

# Human Right or The Right To Be Human<sup>1</sup>

Bambang Budijanto<sup>2</sup>

## *Abstrak*

Dari berbagai peristiwa bersejarah ungkapan concern umat manusia terhadap HAM berlangsung diluar atau bukan atas inisiasi Gereja. Diamnya Gereja atas kejahatan HAM sebenarnya sangat ironis karena Alkitab sangatlah menghargai HAM, termasuk di dalamnya manusia yang tertindas. Kepedulian terhadap yang tertindas dan pembelaan terhadap yang lemah seperti yang selalu menjiwai banyak peraturan di Torah, sangat sulit didapati di Kitab-kitab hukum sejamannya. Dalam menjelaskan ke-ironis-an ini tulisan ini memberikan tiga alternatif: 1. Gereja membaca semua pelanggaran HAM, tetapi penekanan penafsiran nereka terhadap berita Injil membuat mereka enggan (reluctant) untuk memperjuangkan HAM. 2. Mungkin klaim Gereja tentang Alkitab sebagai sumber yang valid untuk penegakkan HAM tidaklah terbukti, menyitir pendapat E. G. Singgih. 3. Gereja kurang sehat secara sosio-psikologis, interaksi Gereja dengan penguasa sangatlah berpengaruh terhadap bagaimana Gereja membaca peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Perjuangan HAM di Indonesia baru sebatas wacana, antara wacana dan realitas terdapat jurang sangat lebar. Jika Gereja belum menyelesaikan beberapa pergumulan di atas, sulit rasanya mengharapkan Gereja terlibat dalam pembangunan “jembatan emas” ini.

**Kata kunci: HAM, Gereja, Demokrasi, Masyarakat Sipil.**

## **1. PENDAHULUAN**

Bagi kebanyakan orang, HAM dilihat sebagai suatu mahluk yang sedang *ngetrend*, makin hari makin populer, namun wujudnya tidak nampak. Dalam banyak tulisan, demonstrasi dan perdebatan HAM sering dipakai

sebagai landasan atau motivasi untuk menuntut sesuatu, dan tetapi juga tidak jarang dipakai sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan pendapat. Oleh pemerintah di dunia ketiga yang cenderung otoriter, HAM diartikan sebagai campur tangan asing dan dianggap sebagai ancaman bagi kelanggengan kekuasaan mereka. Bagi

Amerika, HAM dianggap sangat dekat kaitannya dengan hutang atau bantuan ekonomi. Bagi dunia peradilan, HAM adalah retorika tentang persamaan kedudukan setiap orang didepan hukum. Bagi mahasiswa, HAM adalah demonstrasi. Bagi politikus HAM, adalah proses demokratisasi. Bagi buruh HAM, adalah kenaikan upah. Bagi gereja HAM mungkin tidak berarti apa-apa, karena tidak terlalu dimengerti.

## 2. GEREJA DAN HAM

Gereja mengklaim bahwa akar dari HAM adalah citra manusia yang diciptakan dalam gambar Allah. Gereja melihat bahwa status manusia sebagai "*human being*" yang memberinya martabat (*dignity*) bersumber dari pandangan Allah terhadap manusia; artinya, manusia menjadi berharga karena Allah memandang manusia berharga (Yesaya 43:4a). Studi perbandingan antara kitab Torah dengan kitab-kitab hukum lain di Timur Dekat Kuna (*Ancient Near East*) menunjukkan bahwa perbedaan yang paling menyolok dari kitab Torah, jika dibandingkan dengan kitab-kitab hukum yang lain adalah bahwa Torah sangat menghargai martabat manusia, termasuk didalamnya adalah manusia

yang tertindas, seperti budak, anak yatim, orang asing dan lain sebagainya. Kepedulian kepada yang tertindas dan pembelaan terhadap yang lemah seperti yang menjivai banyak peraturan di Torah, sangat sulit didapati di kitab-kitab hukum sejamannya. Dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat Israel, prinsip kebenaran dan keadilan selalu diminta oleh Yahweh dari para hakim Israel. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus meringkaskan isi Torah dalam Matius 7:12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Injil tidak hanya mengajarkan agar kita tidak merampas hak orang lain, Injil juga tidak hanya mengajarkan agar kita menghormati hak-hak orang lain tetapi lebih dari pada itu, Injil mengajarkan kepada kita agar rela mengorbankan hak kita demi memperjuangkan dan membela mereka yang tertindas dan lemah (1 Yohanes 3:16-18).

Namun demikian, sangat ironis, bahwa berbagai peristiwa bersejarah ungkapan concern umat manusia terhadap HAM berlangsung diluar atau bukan atas inisiasi Gereja. Gejolak-gejolak penting dalam sejarah perjuangan HAM sering terjadi

setelah malapetaka atau kejahatan atas kemanusiaan yang hebat dialami oleh sekelompok manusia, masyarakat atau bangsa. Perang dunia ke II menjadi saksi kejahatan yang dilakukn oleh tentara Jerman atas kemanusiaan, dan khususnya bangsa Yahudi. Berangkat dari pelajaran sejarah ini lahirlah deklarasi HAM (1948) yang bertujuan agar hal serupa ini tidak terulang dalam sejarah umat manusia. Di Cina, gejolak perjuangan HAM yang mulai terdengar akibat kekejaman Revolusi Kebudayaan makin bergelora setelah peristiwa pembantaian Tian'anmen. Para akademisi di Beijing melihat bahwa penindasan dan kejahatan kemanusiaan di Cina tidak boleh dibiarkan berlangsung terus. Di Indonesia, kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Soeharto selama 32 tahun menjadi latar belakang bergaungnya perjuangan HAM. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat berketetapan bahwa pembunuhan masal yang semena-mena di awal Orde baru, di Aceh, di Timor, di Papua, dan di daerah-daerah lain tidak boleh terulang lagi; penculikan, intimidasi, perlakuan tidak adil kepada sebagian warga negara, semuanya itu pelajaran sejarah

yang harus dihentikan. Karena gaung perjuangan HAM di atas tidak diinisiasi oleh gereja, yang percaya bahwa dirinya memiliki *resource* yang paling valid terhadap penghargaan akan martabat manusia, maka kemudian muncul pertanyaan: Bagaimanakah Gereja membaca sejarah di sekitarnya? Apakah Gereja membaca kekejaman Nazi? Kalau ya, bagaimana bunyinya? Apakah Gereja membaca pembantaian Tiannamen? Kalau ya, bagaimana bunyinya? Apakah Gereja membaca pembantaian besar di tahun 1966-1967; 12 November 1991; 13-15 Mei 1998 dan ribuan yang lain di Aceh, Timor, Papua? Pembantaian dukun santet, penculikan aktivis pro demokrasi, Marsinah dan sebagainya, yang begitu panjang daftarnya karena berlangsung begitu lama tanpa interupsi. Kalau ya, bagaimana bunyinya?

Kenyataan yang ironis ini, membawa kita kepada beberapa alternatif penjelasannya:

*Pertama*, Gereja membaca semua pelanggaran HAM di atas, tetapi penekanan penafsiran mereka terhadap Injil membuat mereka enggan (*reluctant*) untuk memperjuangkan HAM. Aliran Pietisme misalnya, yang menekankan bahwa semakin

orang Kristen bertumbuh dewasa, maka semakin dia menanggalkan hak-haknya dengan sukarela (mengosongkan dirinya, bnd Filipi 2:5-8). Hidup yang dijalani sekarang adalah sebagai orang yang berhutang, sebagai budak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus; yang walaupun sudah dimerdekakan, tetapi oleh karena kasih kita kepada Tuhan, kita memilih untuk mengabdikan sebagai budak-budak kebenaran. Justru di dalam meningkatkan diri kita kepada Kristus sebagai hamba-hamba kebenaran, kita memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi hak tidak ada dalam kamus kaum Peitis.

*Kedua*, seperti yang diungkap oleh **Singgih** (1998:120) yaitu, bahwa apa yang sering di klaim oleh Gereja tentang Alkitab sebagai sumber yang valid untuk penegakkan HAM, ternyata tidaklah terbukti. Karena ternyata Alkitab tidak memberikan tuntunan dan ajaran yang memadai tentang penghormatan HAM. Jika hal ini benar adanya, maka Gereja harus berhenti berpura-pura (*pretending*), seakan-akan Gereja adalah sumber pemahaman akan HAM. **Singgih** kemudian menyarankan agar Gereja tidak lagi hanya bersikap sebagai *ecclesia docens* (Gereja yang

mengajar), tetapi juga sebagai *ecclesia discens* (Gereja yang belajar).

*Ketiga*, Gereja kurang fit (sehat) secara sosio-psikologis. Dalam sejarah Gereja tidak hanya berjalan dalam tuntunan doktrin dan teologia, bahkan mungkin Gereja lebih sering dituntun oleh aspek-aspek lain disekitarnya. Interaksi antar Gereja dengan penguasa (politik) bisa sangat berpengaruh terhadap bagaimana Gereja membaca peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di antara masyarakat tertindas disekitarnya. Konflik internal di dalam Gereja (struktur) dapat membuat Gereja tidak dapat membaca pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di halamannya sendiri. Kenikmatan (*leisure*) maupun ancaman (pemasungan) dapat membuat Gereja tumpul dalam mengartikulasikan kebenaran Alkitab dalam meresponi berbagai kejahatan terhadap umat manusia.

### 3. BERBAGAI KONFLIK PEMAHAMAN

#### 3.1. Hak versus Kewajiban

Para orientalist melihat bahwa penekanan "Hak" (**Hobbes**) merupakan nilai yang tidak universal (*culturally subjective*). Lee Kuan Yew dan para

pemimpin Asia lainnya *getol* menyuarakan bahwa bagi bangsa-bangsa Asia, kedudukan "Hak" tidak sepenting "kewajiban."

### 3.2. Universal versus Lokal: Individual versus sosial

Universalkah deklarasi HAM? Atau seperti yang selalu diargumentasikan oleh banyak pemimpin dunia ketiga, bahwa HAM tidak universal. Mereka berpendapat bahwa HAM yang menekankan individualisme adalah ekspresi budaya Barat, yang tentunya tidak cocok dengan budaya Timur yang lebih menekankan kehidupan sosial bersama (komunal); dimana hak individu harus dikorbankan demi kepentingan orang banyak (*jer basuki mawa bea*).

### 3.3. Legal versus Moral

HAM yang oleh Gereja sering di kategorikan berada dalam wilayah moral, oleh kalangan di luar Gereja ditempatkan dalam tataran legal. Gereja berkeyakinan bahwa penjara, undang-undang dan sanksi tidak akan mengurangi pelanggaran HAM, karena persoalan pelanggaran HAM (hak orang lain) adalah persoalan hati. Maka kemudian kita mendiskusikan, apakah kita berbicara tentang *Human Right* (HAM) yang berada dalam tataran legal (deklarasi, undang-undang, dan

sebagainya), atau kita membicarakan *The Right to be Human*, yang oleh beberapa kalangan Gereja dianggap sebagai berada dalam wilayah acuan Moral.

## 4. PENUTUP

Perjuangan HAM di Indonesia nampaknya baru sebatas wacana. Wacana patut disyukuri, tetapi antara wacana dan realitas terdapat jurang sangat lebar. Benar, jurang yang sangat lebar, tetapi bukan jurang yang tak terjembatani. Jika Gereja belum menyelesaikan beberapa pergumulan di atas, sulit rasanya mengharapkan Gereja terlibat dalam pembangunan "jembatan emas" ini.

Keterlibatan Gereja dalam memperjuangkan ditegakkannya HAM harus dimuali dengan memahami HAM, setelah memahami kemudian menghormati HAM, dan akhirnya membela (*advocacy*) HAM. Semoga sejarah mau bersabar menunggu Gereja di Indonesia yang sedang berusaha sedikit demi sedikit memahami apa itu HAM. □

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam acara Seminar "Gereja & Hak Asasi Manusia" yang diselenggarakan oleh ICDS pada tanggal 1 Juli 2000 di International Imperium Hotel Bandung.

---

<sup>2</sup> Direktur Compassion Indonesia dan  
Direktur Institute for Community and  
Development Studies Bandung.